

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik menghadapi perkembangan yang sangat laju di Indonesia dan banyak membawa perubahan dalam kehidupan bangsa dan negara dengan adanya era reformasi. Suatu proses yang dipakai lembaga-lembaga publik sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat disebut Akuntansi sektor publik. Oleh sebab itu setiap lembaga publik dituntut untuk menyajikan pengelolaan laporan keuangan yang bertanggungjawab dan terbuka terhadap masyarakat umum.

Landasan operasional secara tersirat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lumajang yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dapat diterapkan pada kewajiban setiap kantor senter dan kantor cabang sampai eselon II sesuai dengan yang tertera pada Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Presiden Republik Indonesia. Serta berhubungan dengan keterbukaan informasi kegiatan Pemerintahan Daerah, yaitu setiap informasi daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah dapat dilakukan apakah sesuai atau tidak dengan Standart minimum pelayanan publik atau basis regular guna meningkatkan akuntabilitas publik. Karena tolak ukur dalam meyakinkan setiap tindakan dan penyempurnaan dari pengelolaan anggaran harus

meyakinkan setiap tindakan dan penyempurnaan dari pengelolaan anggaran harus andal dan bisa efektif terhadap publik sebagai kekuasaan yang terbaik. Prinsip akuntabilitas adalah masing-masing penerapan intruksi, penggunaan sumber-sumber serta penerapan kekuasaan perlu diselidiki oleh pihak yang bersangkutan ataupun oleh pemerintahan. Sedangkan prinsip transparansi adalah semua pengelola instansi harus memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai pemungutan suatu ketetapan maupun perumusan strategi dalam pengambilan keputusan untuk akses memperoleh informasi yang diperlukan.

Anggaran Berbasis Kinerja dilandaskan atas visi dan misi kinerja yang menjadi media untuk meraih suatu tujuan. Pengawasan yang dilakukan pada penyusunan maupun penggunaan anggaran dapat menciptakan tercapainya anggaran yang baik dan kompeten. Kejadian ini terdapat pada kegiatan belanja langsung karena penggunaan anggaran yang sering tidak sesuai, akibatnya tujuan tidak tercapai dengan baik secara realistis. Landasan *Value For Money* mutlak dilakukan terhadap manajemen anggaran yang baik. Prinsip ini diharapkan dapat membenahi kemampuan sektor publik. *Value for Money* memiliki 3 elemen utama yaitu ekonomi, efektivitas dan efisiensi (Mardiasmo,2009). Ketiga elemen ini bisa terlaksana dengan baik jika pemerintah memakai dana input paling rendah agar mencapai output yang optimum. Pengelolaan anggaran sebaiknya berkaitan oleh *Value for Money* sebab sekarang ini masih banyak perhitungan yang belum dilakukan secara ekonomis yaitu biaya yang mahal, hasil yang rendah atau anggaran yang digunakan tidak berasaskan pada keperluan atau skala prioritas serta anggaran yang boros. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang harus bisa

meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value for Money* ketika menerapkan atau melaksanakan kegiatannya.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Latifah Sinaga yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran yang Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Batu Bara”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tidak menggunakan indikator variabel pengawasan dan tempat observasi yang digunakan berbeda. Objek penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dulunya untuk menunjang kinerja anggaran dalam pelaksanaan strateginya objek analisis ini berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sering mengalami kegagalan karena dalam penyusunan strateginya masih belum dilaksanakan sesuai prosedur. Permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dikarenakan keterbatasan personalia, minimnya SDM Bidang Akuntansi, sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Setelah dilakukan analisis pencapaian kinerja yang mendasar pada konsep *value for money* akhirnya dapat diketahui dan telah berhasil melaksanakan programnya yaitu melaksanakan administrasi perkantoran secara tertib, melaksanakan pemeliharaan sarana dan

prasarana, dan melaksanakan penyusunan Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sehubungan dengan uraian diatas, tujuan dilakukannya observasi ini yaitu untuk mengamati dan menganalisa adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi peneliti mengambil judul tentang “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja anggaran berkonsep *value for money* mempengaruhi akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Lumajang?
2. Apakah kinerja anggaran berkonsep *value for money* mempengaruhi transparansi pada Pemerintah Kabupaten Lumajang?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Lumajang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil observasi ini diharapkan bisa dikategorikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang akuntansi serta cara menerapkan dan mengaplikasikannya, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money*.

b. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya observasi tersebut diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya mengenai kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

b. Bagi Pemerintah

Pada saat pemerintah daerah mengelola anggaran, hasil observasi ini bisa digunakan sebagai pedoman informasi dan bisa menjadi referensi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.

c. Bagi Akademis

Bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan peninjauan untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu akuntansi yang digunakan sebagai meditasi dan yang berminat dengan pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran.

